

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan parkir ilegal di Kecamatan Tembalang sebagai lokasi pendidikan, terungkap bahwa permasalahan yang dihadapi sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pengelolaan ruang publik dan penegakan hukum terkait parkir liar menunjukkan tantangan yang signifikan, di mana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan saling berinteraksi dan mempengaruhi situasi yang ada. Parkir liar di Kecamatan Tembalang telah diatur oleh kebijakan E-Parking yang diambil dari pokok Peraturan Walikota No 70 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem parkir yang lebih teratur dan transparan, serta mengurangi tindakan parkir liar yang selama ini merugikan masyarakat dan pemerintah. Namun, meskipun kebijakan E-Parking telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengawasan yang belum optimal.

Dalam hal ini, perilaku premanisme atas parkir liar yang dahulunya berlangsung secara tidak teratur kini telah bertransformasi menjadi bentuk baru, yaitu premanisme parkir liar yang mengatasnamakan kebijakan pemerintah. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, di mana pelaku premanisme sering kali memanfaatkan kebijakan yang ada untuk melakukan praktik ilegal. Situasi ini tidak hanya merugikan konsumen yang terpaksa

membayar lebih untuk parkir, tetapi juga berdampak negatif pada pemilik toko dan juru parkir yang sah, yang merasa tertekan akibat adanya persaingan tidak sehat. Premanisme ini juga menciptakan masalah serius dalam pengelolaan ruang publik, di mana perebutan wilayah parkir antara juru parkir liar dan petugas resmi sering kali terjadi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk membenahi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Tembalang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan E-Parking diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang, tantangan yang muncul dari perilaku premanisme dan pelanggaran hukum lainnya menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak berwenang lainnya sangat penting. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan parkir dan melaporkan praktik ilegal juga harus dilakukan secara intensif. Dengan demikian, diharapkan bahwa lingkungan parkir di Kota Semarang dapat menjadi lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Akhirnya, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan penertiban dan pengawasan, sementara masyarakat perlu berperan serta dalam menjaga ketertiban dan melaporkan setiap tindakan ilegal yang mereka temui. Hanya dengan kerjasama yang baik antara semua elemen ini,

permasalahan parkir liar dan premanisme dapat diatasi secara efektif, menciptakan Kota Semarang sebagai kota yang lebih aman dan nyaman bagi semua warganya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan parkir ilegal di Kota Semarang dalam Studi Kasus Kecamatan Tembalang ini penulis memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi Masyarakat luas :

1. Peningkatan penegakan hukum menjadi langkah krusial dalam mengatasi masalah parkir ilegal dan premanisme di Kota Semarang. Dengan melakukan razia secara rutin dan konsisten, aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku parkir ilegal. Tindakan tegas ini tidak hanya akan mengurangi jumlah juru parkir ilegal, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Penegakan hukum yang transparan dan adil akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara parkir resmi dan ilegal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka. Melalui kampanye informasi yang efektif, masyarakat dapat diajari tentang risiko dan konsekuensi dari praktik parkir ilegal, serta manfaat menggunakan jasa parkir resmi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, brosur, dan seminar, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jalan. Dengan pemahaman yang lebih

baik, diharapkan masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan layanan parkir yang sah.

3. Penentuan wilayah parkir yang teratur adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem parkir yang lebih terorganisir. Pemerintah perlu melakukan analisis terhadap area yang memiliki permintaan tinggi untuk parkir dan menetapkan zona parkir resmi yang jelas. Dengan adanya peta zona parkir yang teratur, pengguna jalan dapat dengan mudah menemukan tempat parkir yang aman dan legal, sehingga mengurangi kemungkinan mereka memilih parkir ilegal. Penataan yang baik juga akan membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan.
4. Memberikan jaminan dan dukungan lebih kepada juru parkir resmi sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dalam pekerjaan mereka. Pemerintah dapat menyediakan perlindungan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan insentif finansial untuk mendorong lebih banyak individu menjadi juru parkir resmi. Dengan dukungan ini, juru parkir resmi akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini juga akan membantu menciptakan citra positif bagi profesi juru parkir, sehingga masyarakat lebih percaya untuk menggunakan layanan mereka.
5. Implementasi kebijakan yang lebih efektif menjadi Langkah yang penting untuk memastikan bahwa semua inisiatif yang diambil dapat berjalan dengan baik. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan

pengambilan keputusan. Dengan mendengarkan masukan dari masyarakat dan juru parkir resmi, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kebijakan yang responsif dan adaptif akan meningkatkan efektivitas penanganan masalah parkir ilegal dan premanisme, serta menciptakan sistem parkir yang lebih berkelanjutan dan teratur.